

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat suatu instansi harus mengikuti arus teknologi agar dapat terus memenuhi berbagai kebutuhan dalam proses bisnis. Teknologi informasi dalam proses bisnis dapat membantu suatu instansi dalam memberikan suatu layanan yang lebih baik, cepat dan efisien. Seperti instansi pemerintahan di Sumatera Selatan (SUMSEL) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BAPPEDA) yang bertugas dalam melayani pembangunan di SUMSEL.

Bappeda merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan daerah di SUMSEL. BAPPEDA telah melakukan berbagai kegiatan dalam perencanaan pembangunan di SUMSEL yang salah satunya adalah program sigertak plus yang mana dalam program ini BAPPEDA merangkum seluruh data kependudukan di SUMSEL untuk menaungi masyarakat miskin dalam menegakkan kesejahteraan mereka.

Sistem informasi gerakan terpadu serentak (Sigertak Plus) yang didirikan BAPPEDA ini merupakan aplikasi berbasis data terpadu (BDT) by name by address seluruh penduduk miskin di sumatera selatan. Sehingga akan dapat diketahui dengan jelas tentang masalah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga BAPPEDA dapat menyusun program/kegiatan yang tepat saran. Lima prioritas pembangunan yang akan dilakukan sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan 2020 yakni pembangunan SDM dan kualitas tata kelola pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang enkulisif dan pengganguran kemiskinan, peningkatan kedaulatan pangan dan kualitas lingkungan serta stabilitas keamanan umat beragama. Salah satunya infrastruktur sangat penting karena seperti kata Bapenas salah satu

penyebab kemiskinan itu adalah pembangunan yang tidak merata. Kalau sumsel bukan hanya punya program yang merata tapi juga berkeadilan.

Peluncuran aplikasi sigertak plus didasari atas penyerataan persepsi terhadap semua kementerian kelembagaan dan cabangnya di sumsel termasuk juga pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, tidak ada lagi daerah kabupaten/kota yang merencanakan suatu program yang tidak bermuarah pada kesejahteraan. Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa hasil dan penerapan pada sistem sigertak plus, dengan judul penelitian “Analisa Penerapan Sigertak Plus Bappeda Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang nantinya akan dikaji didalam laporan ini. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan Sigertak Plus yang ada di Bappeda SUMSEL.
- b. Bagaimana sistem Sigertak Plus meningkat pada masyarakat.
- c. Apakah sistem Sigertak Plus dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat SUMSEL.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui tingkat penerapan sistem sigertak plus dalam mensejahterakan masyarakat SUMSEL.
- b. Sebagai evaluasi sistem bagi BAPPEDA SUMSEL pada sistem Sigertak Plus.
- c. Untuk mengetahui upaya dan program pemerintah BAPPEDA SUMSEL dalam mengurangi kemiskinan.
- d. Memperoleh pengalaman kerja di BAPPEDA SUMSEL secara langsung.

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berlangsung selama penulis berada dalam masa magang di kantor BAPPEDA SUMSEL. Penelitian ini terbatas pada penerapan sistem sigertak plus dalam

mensejahterakan masyarakat miskin yang berada di SUMSEL dari data yang penulis dapat selama proses magang.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yaitu :

- a. Penulis dan BAPPEDA SUMSEL dapat mengetahui tingkat penerapan sistem sigertak plus sehingga dapat mengetahui sikap lanjut yang harus dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat SUMSEL.
- b. BAPPEDA SUMSEL dapat mengidentifikasi penyebab kemiskinan suatu masyarakat sehingga dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam mensejahterakannya.
- c. BAPPEDA SUMSEL dapat memahami dan mengetahui hasil penerapan sistem sigertak plus.
- d. Sebagai evaluasi sistem bagi BAPPEDA SUMSEL pada sistem Sigertak Plus.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Hall dan Midgley pengertian kemiskinan adalah kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

2.1. Penyebab Kemiskinan

Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab kemiskinan yang paling umum:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan akan semakin meningkat di suatu negara.

2. Angka Pengangguran Tinggi

Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran di suatu negara menjadi tinggi. Semakin banyak pengangguran maka angka kemiskinan juga akan meningkat.

Peningkatan angka pengangguran juga dapat menimbulkan masalah lain yang meresahkan masyarakat. Misalnya munculnya pelaku tindak kejahatan, pengemis, dan lain-lain.

3. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah.

4. Bencana Alam

Bencana alam merupakan faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dicegah karena berasal dari alam. Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain, akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur maupun psikologis.

Peristiwa bencana alam yang besar dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kemiskinan karena kehilangan harta.

5. Distribusi yang Tidak Merata

Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di bawah garis kemiskinan.

2.2 Dampak Kemiskinan

Pada umumnya kemiskinan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak kemiskinan yang sering terjadi:

1. Kriminalitas Meningkat

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan.

2. Angka Kematian yang Tinggi

Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat miskin.

Selain itu, gizi yang buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin. Asupan gizi yang kurang menyebabkan kesehatan dan perkembangan fisik masyarakat miskin sangat buruk.

3. Akses Pendidikan Tertutup

Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan.

4. Pengangguran Semakin Banyak

Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat.

5. Munculnya Konflik di Masyarakat

Rasa kecewa dan ketidakpuasan masyarakat miskin biasanya dilampiaskan dengan berbagai tindakan anarkis. Bahkan seringkali konflik bernuansa SARA timbul di masyarakat sebagai cara pelampiasan kekecewaan masyarakat miskin.

2.3 Kemiskinan di Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan Rp779 miliar untuk menanggulangi kemiskinan sepanjang 2019. Gelontoran dana tersebut digunakan untuk mengurangi persentase kemiskinan Sumsel yang saat ini masih di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, persentase kemiskinan di Sumsel tercatat mencapai 1 juta penduduk atau sekitar 12,80 persen dari total 8 juta penduduk. Sementara itu, persentase rata-rata kemiskinan nasional hanya 9,82 persen.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Ekowati Retnaningsih mengatakan, meski secara persentase masih di atas rata-rata nasional, namun tingkat kemiskinan di Sumsel sudah berangsur turun sejak tiga

tahun lalu. Pada 2015, persentase kemiskinan Sumsel mencapai 14,25 persen, 13,54 persen pada 2016, dan 13,19 persen pada 2017.

2.4 Peran Teknologi Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi (selanjutnya disingkat TIK) untuk mengurangi kemiskinan dirancang sebagai bagian dari Strategi Penanggulangan. Kemiskinan Nasional (disingkat SPKN). Cara pendekatan yang dipilih efektif karena sesuai dengan prinsip TIK sebagai alat bantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, *bukan* sebagai hasil penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, teknologinya paling efektif jika digunakan dalam rangka menerapkan strategi-strategi yang praktis untuk mengurangi kemiskinan. Kedua, cara pendekatan tersebut efisien karena sesuai dengan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil Pemerintah Republik Indonesia dalam melawan kemiskinan, sehingga upaya-upaya tersebut akan berdampak lebih besar dibandingkan tanpa memanfaatkan TIK.

2.2.5 Strategi TIK Untuk Mengurangi Kemiskinan Adalah Membidik Sasaran-Sasaran Berikut.

1. Penyertaan TIK dalam kebijakan dan strategi pengurangan kemiskinan.
2. Peningkatan pendapatan si Miskin dan pengurangan biaya penunjangannya.
3. Pemusatan TIK pada ‘empat tonggak pengurangan kemiskinan’, yaitu:
 - a. Menciptakan peluang kerja (*creating opportunity*);
 - b. Memberdayakan masyarakat (*community empowerment*);
 - c. Mengembangkan kemampuan (*capacity building*);
 - d. Menciptakan perlindungan sosial (*social protection*).
4. Pengoptimalan kiprah di bidang-bidang kegiatan berikut dengan bantuan TIK, yaitu:
 - a. Memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*) dan
 - b. terpinggirkan (*marginalized*);
 - c. Mendorong usaha mikro (*fostering micro-entrepreneurship*);
 - d. Meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh (*telemedicine*);
 - e. Memperbaiki pendidikan melalui *e-learning* dan pembelajaran-seumur hidup (*life-long learning*);

- f. Mengembangkan perdagangan melalui *e-commerce*;
- g. Menciptakan ketataprajaan (*governance*) yang lebih efisien dan transparan melalui *e-governance*;
- h. Mengembangkan kemampuan;
- i. Memperkaya kebudayaan;
- j. Menunjang pertanian;
- k. Menciptakan lapangan kerja (*creating employment*); dan
- l. Mendorong mobilisasi sosial.

2.2.6 Untuk Mencapai Sasaran-Sasaran Tersebut, TIK Menyiasati Cara-Cara Pendekatan Berikut

1. Meningkatkan kesadaran;
2. Memobilisasi informasi;
3. Menyediakan akses informasi;
4. Mengembangkan kemampuan ;
5. Membina pemimpin yang sadar-TIK;
6. Menggalang kemitraan; dan
7. Memberdayakan potensi setempat dalam konteks desentralisasi

BAB III

TINJAUAN UMUM

3. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

3.1. Visi dan Misi

a. VISI

VISI BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yaitu Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional. pada visi Provinsi Sumatera Selatan diatas, BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut:

"terwujudnya lembaga perencana yang andal dan akuntabil berbasis kebutuhan masyarakat mininjau sunisel sejahtera, lebih maju dan berdaya saing internasional Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, yang dalam kerangka tersebut di atas ditetapkan 3 (tiga) kntena yaitu :

Perencanaan yang andal seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan sikap profesional, rasional, efisien, dan efektif.

Perencanaan yang akuntabel seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan terukur dan transparan.

Perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat mengutamakan kerjasama, kemitraan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan proses bottom-up untuk menampung aspirasi masyarakat melalui Proses Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai dengan Musrenbang Provinsi.

kesejahteraan. Sigertak plus ini merupakan aplikasi berbasis data terpadu (BDT) *by name by address* seluruh penduduk miskin di sumsel.

Sigertak plus yang merupakan perencanaan program penanggulangan berbasis web yang sudah terintegrasi antara Provinsi dengan Kabupaten/kota. Inovasi ini merupakan tindak lanjut Perugub nomor 36 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan melalui gertak sejuta mandiri inovasi ini merupakan satu-satunya di indonesia yang tujuannya untuk membantu seluruh stakeholder terkait penanggulangan kemiskinan dalam melakukan input/output data menganalisa intervensi kemiskinan dengan mudah dilakukan dimana saja secara efektif dan efisien. Selain itu juga untuk meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran program kemiskinan antar sektor dan daerah untuk meningkatkan kontrol terhadap proses penanggulangan kemiskinan di daerah terutama terpenting sasaran penerima manfaat. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan lebih tepat sasaran. Keunggulan inovasi (plus) ini telah terintegrasi pada level provinsi dengan kabupaten/kota. Sasaran target program/kegiatan tidak hanya menampilkan jumlah secara agregat, namun sudah pada *level by name by address* bahkan *pictrue*.

3.3 Gambaran Umum Aplikasi SiGertak Plus

SiGertak Plus (Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak) yang merupakan perencanaan program penanggulangan berbasis web yang sudah terintegrasi antara Provinsi dengan Kabupaten/kota. Inovasi ini merupakan tindak lanjut dari Pergub Nomor 35 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan dan Pergub Nomor 36 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Gertak Sejuta Mandiri.

3.4 Tujuan dan Sasaran SiGertak Plus

3.3.5 Tujuan

Tujuan Pembuatan aplikasi SIGertak+ dimaksudkan untuk :

1. Membantu seluruh stakeholder terkait penanggulangan kemiskinan dalam melakukan input/output data, menganalisa dan mengintervensi kemiskinan dengan mudah dan dilakukan dimana saja secara efektif dan efisien;

2. Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran program kemiskinan antar sektor dan daerah (Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Swasta dan Masyarakat); dan
3. Meningkatkan Kontrol terhadap proses penanggulangan kemiskinan di daerah terutama targeting sasaran penerima manfaat.

3.3.6 Sasaran

Sasaran dari Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGertak+) yaitu:

1. Tersedianya data terkini terkait penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan
2. Terwujudnya sinergisitas perencanaan dan penganggaran program kemiskinan lintas sektor
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

3.5. Manfaat SiGertak Plus

meningkatkan efektifitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran (sasaran hingga *by name by address*) dan tepat lokasi sehingga pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Sistem Informasi SIGertak+ juga telah terintegrasi dengan sistem informasi di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sehingga lebih memudahkan dalam mengakses data kemiskinan hingga ke level individu.

Outcome yang akan dicapai dari Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGertak+) adalah meningkatkan efektifitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran (sasaran hingga *by name by address*) dan tepat lokasi sehingga pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Sistem Informasi SIGertak+ juga telah terintegrasi dengan sistem informasi di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sehingga lebih memudahkan dalam mengakses data kemiskinan hingga ke level individu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

3. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengertian Aplikasi Sigertak Plus BAPPEDA SUMSEL

Sigertak adalah sistem informasi keselarasan dan program keselarasan lokasi dengan kantong kemiskinan, keselarasan dengan data basis data terpadu (BDT) dalam penanggulangan kemiskinan untuk seluruh Stakeholder. Aplikasi sistem informasi gerakan terpadu serentak (sigertak plus) ialah untuk penyamanan persepsi terhadap semua kementerian kelembagaan dan cabangnya di sumsel termasuk juga pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, tidak ada lagi daerah kabupaten/kota yang merencanakan suatu program yang tidak bermuarah pada kesejahteraan. Sigertak plus ini merupakan aplikasi berbasis data terpadu (BDT) by name by address seluruh penduduk miskin di sumsel, berikut tampilan utama aplikasi sigertak di bawah ini :



The screenshot shows a web page for logging into the Sigertak Plus system. At the top, the word "Login" is displayed. Below it, a message reads "Silakan memasukkan username dan password Anda". There are two input fields: "Username" and "Password", each with a red asterisk indicating a required field. A "Login" button is positioned below the password field. At the bottom of the page, there is a horizontal line with navigation links: "Home | User Manual | v1.5". Below the links is a row of logos for various Indonesian provinces, and at the very bottom, the text "Copyright © 2017 TNPK Provinsi Sumatera Selatan" is visible.

Sumber : <https://www.sigertak.sumselprov.go.id>

Gambar.4.1. Halaman Awal Login Akun SIGertak+

Sigertak Plus juga dikatakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang mememahami istilah secara subyektif dan komparatif,

sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif dan yang lainnya memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:

- a). Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b). Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- c). Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Alamat SIGertak dapat diakses melalui <https://sigertak.sumselprov.go.id> dengan tampilan awal seperti pada gambar 2. Semua stakeholder yang terlibat dapat mengakses dan menggunakan dengan mudah dan mengelola aplikasi SIGertak. Baik oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Swasta/Masyarakat dengan alokasi sumber dana dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota,

Apabila login berhasil dilakukan akan ditampilkan beranda utama seperti pada gambar 3 dan 4 yang berisikan rekapitulasi semua Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan dari semua stakeholder dan semua daerah Kabupaten/Kota beserta persentase penggunaan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dalam bentuk diagram batang dan ven. Secara spasial juga dapat ditunjukkan pemetaan kemiskinan dengan semua kegiatan penanggulangan kemiskinannya terhadap sasaran/variabel yang menjadi masalah. Akan tergambar seberapa besar, banyak dan tepatnya program/kegiatan yang dilaksanakan dalam mengintervensi permasalahan yang ada, berikut Gambar peta kegiatan penanggulangan kemiskinan :



Sumber : <https://www.sigertak.sumselprov.go.id>

Gambar.4.2. Peta Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

4.2 Mengetahui Persentase Pencapaian Kemiskinan Sumatera Selatan

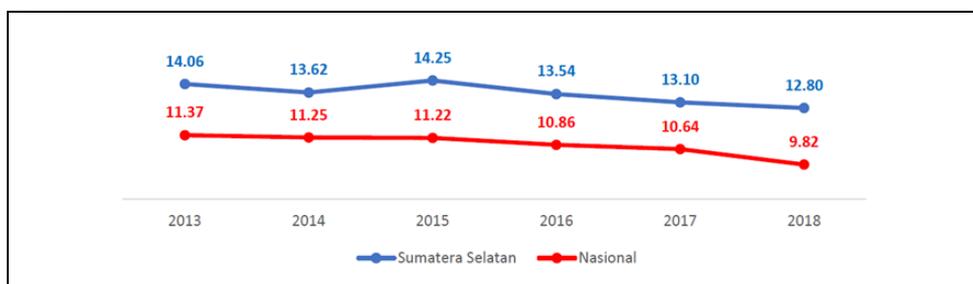
Indikator keberhasilan suatu daerah didalam penanggulangan kemiskinan secara makro dapat diukur melalui persentase/tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin yang datanya secara resmi dirilis oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya. Mengacu data tersebut , Provinsi Sumatera Selatan secara Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 14,06% hingga 2018 212,80%, berikut hasil persentase pencapaian kegiatan penanggulangan kemiskinan, berikut Gambar hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan (SIGertak+) :



Sumber : <https://www.sigertak.sumselprov.go.id>

Gambar.4.3. Hasil Kegiatan Penggulangan Kemiskinan (SIGertak+)

Tugas berat sumatera selatan selanjutnya mencapai target kemiskinan satu digit yang telah ditetapkan didalam akhir periode RP JMD 2023. Dari capaian saat ini 2018 sebesar 12,80% masih ada gap terhadap target RP JMD tahun 2018 (12,69%) sebesar 0,11% serta target RP JMN tahun 2019 (7,80%) sebesar 5%. Jika diasumsikan penurunan terjadi hanya sebesar 0,38% per tahun , maka pencapai target penurunan kemiskinan yaitu 9,20% ditahun 2023 (RP JMD 2023) dikuatirkan sulit direalisasikan, berikut Grafik Tingkat Kemiskinan di SUMSE, berikut Gambar grafik tingkat kemiskinan di SUMSEL :



Sumber : <https://www.sigertak.sumselprov.go.id>

Gambar.4.4. Grafik Tingkat Kemiskinan di SUMSEL

Menindaklanjuti hal tersebut maka Provinsi Sumatera Selatan melalui Bappeda Provinsi Sumatera Selatan bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sumsel telah membangun gerakan penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan berkesinambungan antar semua stakeholder secara menyeluruh dan sistematis untuk bergerak dalam rentang waktu yang sama dalam mengentaskan kemiskinan melalui program GERTAK SEJUTA MANDIRI (Gerakan Terpadu Serentak Semesta Menuju Rumah tangga Mandiri). Program tersebut menggunakan sasaran Basis Data Terpadu (BDT TNP2K) sehingga diharapkan dapat tepat sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut dibangun sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan dengan branding “Sigertak” dimana aplikasi ini merupakan sistem informasi data kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi berbasis BDT dengan merujuk pada program inovatif penanggulangan kemiskinan Sumatera Selatan, GERTAK SEJUTA MANDIRI. Aplikasi dikembangkan dengan teknologi

berbasis web untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan tepat sasaran. Dengan penerapan teknologi informasi seperti ini, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan usaha-usaha pengentasan kemiskinan. Data yang akurat dan terstruktur juga menjadikan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran pada akhirnya nanti menurunkan angka kemiskinan dengan efektif, efisien dan tuntas.

4.3 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan sangat kompleks, sehingga perspektif dalam melihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut. Persoalan real dalam masyarakat biasanya karena adanya kecacatan individual dalam bentuk kondisi dari kelemahan biologis, psikologis, maupun kultural sehingga dapat menghalanginya untuk memperoleh peruntungan untuk dapat memajukan hidupnya. Kelompok yang masuk dalam golongan yang tidak beruntung, yaitu kemiskinan fisik yang lemah, kerentaan, keterisolasian dan ketidakberdayaan.

Pada umumnya di Sumatera Selatan penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut: Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Sumatera Selatan, Seperti kita ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Sumatera Selatan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan. Tidak meratanya pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relative tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang disebut tidak meratanya pendapatan penduduk.

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah banyak masyarakat Sumatera Selatan yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumnya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki ketrampilan yang memadai sehingga dapat memperoleh

pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan dapat di tanggulangi. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global. Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:

- a) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
- b) Politik ekonomi yang tidak sehat.
- c) Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:
 - Rusaknya syarat-syarat perdagangan
 - Beban hutang
 - Kurangnya bantuan luar negeri, dan
 - Perang
 - Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan dengan maksimal.

- d). Biaya kehidupan yang tinggi.

Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

- e). Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan

sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.

f). Kurangnya perhatian dari pemerintah.

Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi masalah Negara yang semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kurangnya perhatian pemerintah akan masalah ini mungkin menjadi salah satu penyebabnya.

g). Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

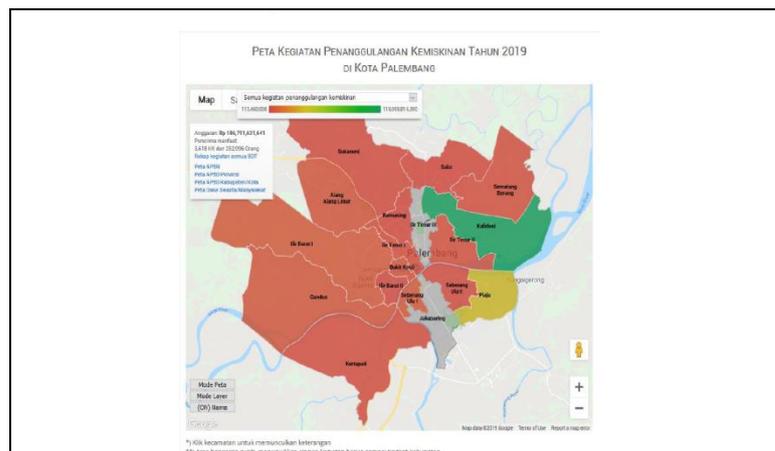
Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

4.4. Proses Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Selatan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendasar dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Presiden RI. NO. 13 Tahun 2009 tentang penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang ataupun sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara

bermartabat. Hak- hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan , air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki, berikut Hasil Pemetaan Kemiskinan Pada Sistem SiGertak Plus :



Sumber : <https://www.sigertak.sumselprov.go.id>

Gambar.4.5. Hasil Pemetaan Kemiskinan Pada Sistem SiGertak Plus

Sejalan dengan arah kebijakan penanggualangan kemiskinan nasional, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan juga mengacu pada tiga jalur strategi pembangunan yaitu:

- a. Pro-Pertumbuhan (*pro-growth*), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis, termasuk perbaikan iklim investasi.
- b. Pro-Lapangan Kerja (*Pro-Job*), untuk menciptakan lapangan kerja termasuk didalamnya menciptakan tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif.
- c. Pro-Masyarakat Miskin (*Pro-Poor*), untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, ekonomi perdesaan.

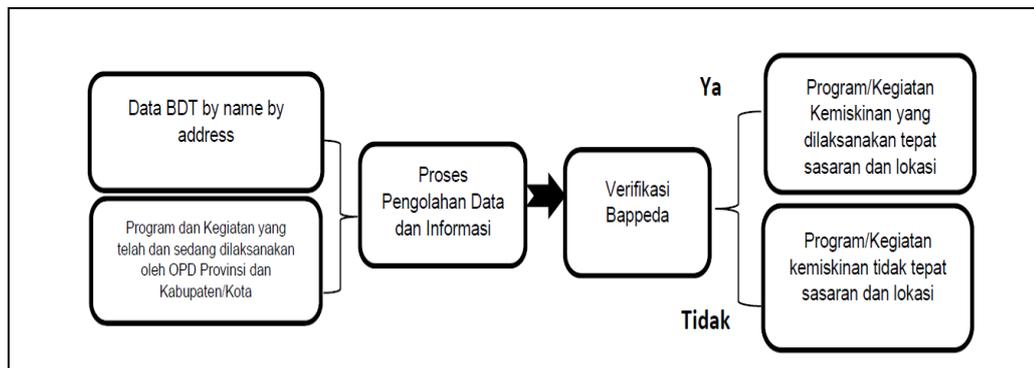
Terkait tentang regulasi Provinsi Sumatera Selatan tentang penanggulangan kemiskinan masih sebatas keputusan Gubernur. Sementara untuk target

kemiskinan sudah dicantumkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019, dimana penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan di Sumatera Selatan. Terkait penggunaan data kemiskinan (targetting) belum dibuatkan regulasinya tapi hanya berupa himbauan TKPK Kabupaten/Kota yang selalu disampaikan pada saat rapat koordinasi.

Peran pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui TKPK Kabupaten/Kota. Menjadi semakin penting mengingat kepastiannya sebagai kepanjangan tangan maupun ujung tombak pemerintah Provinsi di daerah. Sinergitas antara pemerintah Provinsi dan Daerah perlu tetap dijaga agar berkelanjutan sehingga kinerja penanggulangan kemiskinan maupun penguatan kelembagaannya dapat diaplikasikan dan dirasakan oleh masyarakat, upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergi antara Provinsi, Pemerintah daerah dan masyarakat/swasta. Selain itu sasaran program juga diperlukan agar program dapat diterima oleh wilayah miskin, tertinggal, rumah tangga, ataupun keluarga yang berhak dalam jumlah yang tepat.

4.5. Upaya dan Program BAPPEDA SUMSEL Dalam Pengerasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen, dan diperlukan strategi penangan yang juga tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan bersinambungan.



Sumber : <http://bappeda.sumselprov.go.id/>

Gambar.4.6. Alur Proses Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan Sigertak Plus

Perumusan dan pelaksanaan sistem informasi manajemen kemiskinan SIGertak ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif terhadap semua sektor dan *stakeholder* terkait. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi yang terdiri dari : unsur Bappeda Provinsi, TKPK Provinsi Sumatera Selatan, OPD Provinsi, dan Bappeda Kabupaten/Kota (mewakili OPD di masing-masing Kabupaten/Kota) bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing.

Aplikasi SIGertak+ merupakan pengembangan dari aplikasi SIGertak sebelumnya. Makna Plus pertama menunjukkan adanya intergrasi aplikasi SIGertak pada level Provinsi dengan level Kabupaten/Kota. Kedua bahwa sasaran target program tidak hanya menampilkan jumlah secara agregat saja, namun sudah pada level *by name by address* bahkan beberapa program/kegiatan telah *by picture*.

Penyajian seluruh variabel kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) hingga *by name by address* secara spasial merupakan harapan utama dari aplikasi ini. Disajikannya data dan informasi kemiskinan secara interaktif dan informatif tentunya akan dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah terutama bagi pengambil keputusan untuk mengetahui, membaca serta menganalisa situasi pada setiap variabel data kemiskinan hingga pada level desa bahkan rumah tangga dan individu.

Dengan dimasukkannya beberapa varian variabel BDT pada setiap level wilayah mulai dari, hingga Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan bahkan nama penerima program di aplikasi SIGertak+, akan dapat dengan mudah diketahui secara detail berbagai faktor dan kondisi yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut rendah. Selain itu yang tidak kalah

penting adalah pada aplikasi ini dapat diketahui seberapa tepat atau tidaknya sebuah kegiatan dapat mendukung permasalahannya.

Saat ini, perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi adalah *updating* Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten/Kota.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menjalankan program-programnya dalam bentuk:

- 1). Menurunkan jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan melalui bantuan kredit, jaminan usaha dan pegadaan sarana dan prasarana seperti puskesmas, inpres, KUD, dan sebagainya.
- 2). Mengusahakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui distribusi sembako yang dibagikan secara gratis kepada penduduk miskin.
- 3). Mengusahakan pelayanan kesehatan yang memadai dengan menyebarkan tenaga-tenaga kesehatan ke desa dan pegadaan obat-obatan melalui puskesmas.
- 4). Mengusahakan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dengan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah.
- 5). Menyediakan kesempatan bekerja dan berusaha melalalui proyek-proyek perbaikan sarana dan prasarana milik pemerintah.
- 6). penyediaan kredit dan modal usaha yang diberika dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat miskin.
- 7). Memenuhi kebutuhan perumahan dan sanitasi dengan memperbanyak penyediaan pemenuhan air bersih dengan pegadaan PAM.
- 8). Menyediakan sarana listrik, sarana telekomunikasi dan sejenisnya dan sebagainya.

Dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi, tidak mungkin perekonomian sepenuhnya disetrahkan kepada mekanisme pasar, tapi diperlukan adanya peranan pemerintah dalam hal yang mengatur ekonomi. Salah satu pemerintah menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dharapkan mampu meningkatkan efesiensi perekonomian sehingga terjadi peningkatan nilai dalam ukuran uang dari pengeluaran pemerintah yang diterima oleh pembayar pajak, sedangkan nilai outputnya bertambah besar atas pemanfaatan sejumlah sumber

daya (peranan fiskal) dapat diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan pembangunan ekonomi.

Untuk mengentaskan kemiskinan maka dituntut peranan pemerintah daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin dan kebijakan dalam pengeluaran pemerintah, dimana setiap pengeluaran pemerintah yang dibelanjakan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

4.6. Analisa SWOT

Strengths (kekuatan)

1. Untuk membantu seluruh stakeholder terkait penanggulangan kemiskinan dalam melakukan *input/output* data, menganalisa dan mengintervensi kemiskinan dengan mudah dan dilakukan dimana saja secara efektif dan efisien.
2. Tersedianya data terkini terkait penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan, Terwujudnya sinergisitas perencanaan dan penganggaran program kualitas monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangi kemiskinan di daerah.
3. meningkatkan efektifitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran (sasaran hingga *by name by address*) dan tepat lokasi sehingga pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Selatan.
4. penanggulangan kemiskinan dapat diukur melalui persentase/tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin yang datanya secara resmi dirilis oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya.
5. Aplikasi dikembangkan dengan teknologi berbasis web untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan tepat sasaran.
6. Penguatan konektivitas kualitas infrastruktur dan energi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kedaulatan pangan pangan dan kualitas lingkungan serta stabilitas keamanan umat beragama.
7. Dalam aplikasi ini kita juga dapat melihat data penduduk miskin yang masuk dalam BDT serta riwayat bantuan yang pernah diterima. Target penanggulangan dalam SIGertak+ yaitu individu tidak bekerja; individu tidak bersekolah, individu menderita cacat, RT dengan rumah tidak layak huni, RT dengan dan sebagainya.

Weakness (Kelemahan)

1. Hanya bisa diakses oleh orang yang tertentu.
2. Hanya bisa diakses oleh orang yang mengerti tentang *internet*.
3. Dalam keadaan tertentu (jaringan sibuk) proses mengakses menjadi lambat.
4. Angka kemiskinan yang masih tinggi dari rata-rata nasional.
5. Ketergantungan pada alat (komputer dan jaringan *internet*) sangat tinggi.
6. Belum menggunakan aplikasi android masih menggunakan berbasis web.

Opportunities (Peluang)

1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dapat memungkinkan untuk mengembangkan Sistem Informasi SiGertak+ (plus).
2. Dengan terintegrasinya semua sistem informasi dapat memudahkan organisasi untuk mendata kemiskinan di Sumatera Selatan ini.

BAB V

PENUTUP

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Aplikasi sigertak merupakan tools yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi program kemiskinan yang dilaksanakan seluruh stakeholders di sumsel, tahun 2019, bappeda telah menyumbangkan aplikasi sigertak menjadi sigertak plus (+), keunggulan sigertak yaitu telah terintegrasi dengan kabupaten/kota dan telah ditambahkan data foto sipenerima manfaat (*name by by address by picture*), dengan aplikasi sigertak plus kita dapat mengetahui lokasi dan penerima manfaat yang tepat sasaran, dua poin penting dalam sigertak plus yaitu data BDT dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di sumsel.

Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua ini masyarakat.

4.2. Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Sumatera Selatan yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.